

PENGUNGKAPAN RISIKO FINANSIAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS PERBANKAN INDONESIA

Djoko Suhardjanto
Aryane Dewi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, 57126

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance to financial risk disclosures of Indonesian banks. Corporate governance was identified as the board size, the number of board meetings, the proportion of independent commissioners, the proportion of independent audit committee members and number of audit committee meetings. This study also used leverage and profitability as control variable. The level of financial risk disclosure was measured based on identified items of a circular enclosure of Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003. Under purposive sampling, secondary data of 60 annual reports year 2007-2009 of banks in Indonesian Stock Exchange were selected. The average level of financial risk disclosures was at 46.50%. It indicated that Indonesian's banks were not fully compliance to regulations since financial risk disclosures were as mandatory matters. The result of multiple regression showed that corporate governance affected the level of financial risk disclosure through the variable board size and the number of board meetings. The important role in implementing tata kelola perusahaan (company management) was at the board of commissioners who served as supervisors of activities and performance of banks as well as advisory directors in ensuring that companies implemented good corporate governance, including financial risk disclosures (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Key words: *corporate governance, financial risk disclosures, banking*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran tata kelola perusahaan dalam pengungkapan risiko finansial (*financial risk disclosure*) pada perbankan Indonesia. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit.

Diskusi tentang pengungkapan risiko dan tata kelola perusahaan terus meningkat sejak awal abad dua puluh satu karena skandal perusahaan besar seperti Ahold, Enron dan Worldcom (Oorschot, 2009). Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi. Untuk mengimbangi hal tersebut

Korespondensi dengan Penulis:

Djoko Suhardjanto: Telp./Fax.+62 271 669 090

E-mail: suhardjanto04@yahoo.com

dibutuhkan praktik tata kelola perusahaan yang sehat dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank yang baik.

Di Indonesia, kasus bank bermasalah karena praktik perbankan yang tidak sehat yang mengesampingkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan telah banyak terjadi (<http://grundelan-bankcentury.wordpress.com>, 2010). Kasus kredit macet yang menyebabkan likuidasi Bank Summa pada tahun 1992 menjadi salah satu potret kelam industri perbankan di Indonesia. Kurangnya transparansi yang dilakukan pihak manajemen bank kepada *stakeholder*, merupakan salah satu penyebab utama maraknya kasus bank bermasalah yang terjadi di Indonesia. Penyebab lainnya, yaitu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris selaku pengawas pelaksanaan tata kelola perusahaan pada perbankan belum dilaksanakan dengan baik (<http://www.tempointeraktif.com>, 2009). Beberapa kasus lain dengan penyebab yang serupa yaitu likuidasi 16 bank pada tahun 1997 (seperti Bank Pinaesaan, Bank Amrico, Bank Andromeda, Bank Guna Internasional, Bank Umum Majapahit, dan Bank Kosagraha Semesta), skandal laporan keuangan ganda Bank Lippo pada tahun 2002, kasus L/C (*letter of credit*) fiktif Bank BNI tahun 2003, kasus pembekuan usaha Bank Global pada tahun 2004, kasus Bank Century tahun 2008, dan masih banyak deretan kasus bank bermasalah lainnya yang membuktikan kurangnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan pada perbankan di Indonesia.

Bank merupakan lembaga yang dikenal sebagai *risk taking entities* (Oorschot, 2009). Usaha bank selalu dihadapkan pada pengambilan risiko yang besar, seperti dalam aktifitas pendanaan, perkreditan dan *treasury*. Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan menjadi penting karena dapat mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi stakeholder, terutama investor dan penabung. Laporan keuangan dan pengungkapan-

nya penting dan berarti bagi manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja perusahaan kepada stakeholder (Healy & Palepu, 2001).

Menurut Oorschot (2009), beberapa tahun lalu pengungkapan risiko masih bersifat sukarela, khususnya yang berkaitan dengan instrumen finansial. Di Indonesia, pengungkapan risiko oleh perbankan merupakan salah satu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang secara eksplisit diatur dalam PSAK No. 31 (revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan yang secara efektif mulai diterapkan tahun 2001.

Sejak tahun 2001 studi empiris mengenai pengungkapan dan hubungannya dengan karakteristik spesifik perusahaan telah banyak dilakukan oleh peneliti diantaranya Amran, *et al.* (2009), Linsley, Shrivies, & Crumpton (2006). Amran, *et al.* (2009) mengungkap ada asosiasi positif antara *size* dan tingkat pengungkapan risiko. Lebih spesifik, Helbok & Wagner (2006) meneliti luas pengungkapan risiko operasional dalam laporan keuangan 59 bank komersial di *North-America*, Asia dan Eropa pada tahun 1999-2001. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan dengan profitabilitas yang lebih rendah mengungkapkan penilaian dan pengelolaan risiko operasional dengan lebih luas. Penelitian lainnya dilakukan oleh Hossain (2008) pada perbankan di India. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *board compositions* yang diukur dengan komposisi komisaris independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Selanjutnya, Oorschot (2009) melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan risiko pada perbankan di Jerman. Di Indonesia, penelitian terkait pengungkapan risiko finansial pada perbankan belum pernah dilakukan.

Risiko finansial berkaitan dengan suatu kemungkinan perubahan yang terkait dengan instrumen finansial seperti suku bunga, *financial instrument price*, *commodity price*, nilai tukar, indeks harga

Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia

Djoko Suhardjanto & Aryane Dewi

dan tingkat kredit yang akan terjadi di masa depan. Pengungkapan risiko finansial berkaitan dengan pengungkapan mengenai keberadaan risiko, manajemen risiko dan arah kebijakan risiko finansial. Klasifikasi risiko finansial menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK (2008) dan IFRS 7 (2008) pada Tabel 1.

Penelitian ini menggunakan klasifikasi risiko finansial berdasarkan Tabel 1. Menurut Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003, penerapan risiko keuangan sekurang-kurangnya mencakup: (1) definisi; (2) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (3) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko; (4) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan (5) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Agar risiko finansial dalam laporan tahunan diungkapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencukupi kebutuhan informasi para *stakeholders*, maka diperlukan adanya praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Solomon, Norton, & Joseph (2000) yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko merepresentasikan perbaikan praktik tata kelola perusahaan.

Ho & Wong (2001) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggungjawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indika-

tor utama standar tata kelola perusahaan dalam sebuah ekonomi. Penerapan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan (Ho & Wong, 2001; Khomsiyah, 2003). Ettredge, *et al.* (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa kualitas tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan wajib.

Peran penting dalam melaksanakan tata kelola perusahaan berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres, *et al.*, 2005). Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan memunculkan perpaduan *skill* antar anggotanya sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampaikan perusahaan termasuk juga berkaitan dengan risiko finansial.

Menurut PBI Nomor: 8/14/PBI/2006, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Kinerja dan tugas dewan komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan akan efektif apabila masing-masing anggota dewan secara aktif hadir dalam pertemuan dewan komisaris (PBI Nomor: 8/14/PBI/2006). Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komposisi komisaris indepen-

Tabel 1. Klasifikasi Risiko Finansial

PBI Nomor: 5/8/PBI/2003	PSAK 50 (revisi 2006)	P3LKEPPBANK (2008)	IFRS 7 (2008)
Risiko kredit	Risiko kredit	Risiko khusus: Risiko kredit	<i>Credit risk</i>
Risiko likuiditas	Risiko likuiditas	Risiko likuiditas	<i>Liquidity risk</i>
Risiko pasar:	Risiko pasar:	Risiko pasar:	<i>Market risk:</i>
- Risiko suku bunga	- Risiko suku bunga	- Risiko suku bunga	- <i>Interest rate risk</i>
- Risiko nilai tukar	- Risiko mata uang	- Risiko nilai tukar rupiah	- <i>Currency risk</i>

Sumber: PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK (2008) dan IFRS 7 (2008)

Catatan: PSAK 50 (revisi 2006) telah diperbaharui menjadi PSAK 60 (revisi 2010) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 2011 tetapi belum dipublikasikan, oleh karena saat itu penelitian sudah dalam proses akhir maka penelitian ini mengacu pada PSAK 50 (revisi 2006).

den karena keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung oleh keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris (Permatasari, 2009). Menurut Ettredge, *et al.* (2010) komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan dalam kepatuhan pengungkapan wajib.

Herwidayatmo (2000) menyatakan bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia pada umumnya belum memadai. Keanggotaan dewan komisaris selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan kekerabatan sehingga menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, mewajibkan dewan komisaris membentuk sekurang-kurangnya komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dengan dibentuknya komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris. Menurut FCGI (2001), komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota. Salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Komite audit independen tidak terafiliasi dengan perusahaan dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari (FCGI, 2001), sehingga kinerjanya dalam membantu dewan komisaris dapat dipercaya. Menurut Ho & Wong (2001) komite audit independen berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan. Menurut Li, *et al.* (2008) dan Ettredge, *et al.* (2010), frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa hal, pertama fokus penelitian pada per-

bankan yang merupakan *highly regulated entities*. Penelitian mengenai peran tata kelola perusahaan dalam pengungkapan risiko finansial untuk perbankan di Indonesia belum pernah dilakukan. Studi empiris diperlukan untuk membangun pendekatan dalam mengukur kualitas dari pengungkapan risiko (Oorschot, 2009). Kedua, sejak terjadinya krisis keuangan tahun 2007, perhatian terhadap pengungkapan risiko sebagai bentuk pengawasan dan transparansi informasi dalam industri perbankan mengalami peningkatan sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi sebagai *sound basis literature* untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengungkapan risiko finansial di Indonesia.

HIPOTESIS

Dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola perusahaan (FCGI, 2001). Menurut Sembiring (2005), jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil (Dalton, *et al.*, 1999; Nasution & Setiawan, 2007; dan Abeysekera, 2008). Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan risiko finansial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis 1:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Semakin banyak frekuensi rapat yang

Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia

Djoko Suhardjanto & Aryane Dewi

diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003; Brick & Chidambaran, 2007; dan Ettredge, *et al*, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis 2:

H₂: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.

Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen (Permatasari, 2009). Komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan (Cerbioni & Parbonetti, 2007; Abeysekera, 2008; Hossain, 2008; Nurkhin, 2009; dan Ettredge, *et al*, 2010). Semakin independen dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko finansial. Maka dapat dikembangkan hipotesis 3:

H₃: Komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.

Sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Nasution & Setiawan (2007), Li, *et al*. (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko finansial. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis 4:

H₄: Komposisi komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.

Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap operasi perusahaan termasuk kaitannya dengan praktik kinerja perusahaan (Cety & Suhardjanto, 2010). Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI, 2001). Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan (Li, *et al*, 2008 dan Ettredge, *et al*, 2010). Semakin sering dilakukan rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko finansial. Maka dapat dikembangkan hipotesis 5:

H₅: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.

Selain menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menyertakan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2009 (berturut-turut 29 bank, 28 bank dan 29 bank). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang *listing* di BEI dan menerbitkan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut untuk tahun 2007-2009 dan dipublikasikan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah sampel sebesar 75 *annual reports*.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari

laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009. Selain itu, data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD), situs www.idx.co.id dan situs masing-masing perusahaan sampel.

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen dan kontrol dengan definisi dan pengukuran sebagai berikut:

Variabel Independen

Ukuran dewan komisaris

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Dalton (1999), Nasution dan Setiawan (2007) dan Abeysekera (2008) yaitu jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

Jumlah rapat dewan komisaris

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Brick & Chidambaram (2007) dan Ettredge, *et al.* (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun.

Komposisi komisaris independen

Komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Abeysekera (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, *et al.* (2010).

Komposisi komite audit independen

Indikator yang digunakan adalah persentase anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran komite audit perusahaan sesuai dengan penelitian Nasution & Setiawan (2007), Li, *et al.* (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010).

Jumlah rapat komite audit

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li, *et al.* (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, *et al.* (2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *pengungkapan risiko finansial* dalam *annual report* perusahaan perbankan. PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 membagi *financial risk* menjadi tiga jenis risiko, yaitu: (1) risiko kredit; (2) risiko pasar: risiko suku bunga dan risiko nilai tukar; dan (3) risiko likuiditas. Untuk masing-masing risiko terdapat delapan (8) item yang wajib diungkapkan, sehingga total item dalam penelitian ini sebanyak 32 item.

Pengungkapan risiko finansial diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, jika item-item tersebut diungkapkan dalam *annual report* maka diberikan skor 1 dan skor 0 diberikan jika item tersebut tidak diungkapkan dalam *annual report*. Pengungkapan risiko finansial dapat diukur dengan menjumlahkan skor pengungkapan untuk setiap *annual report*. Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kuantitas pengungkapan risiko finansial dalam penelitian ini:

$$DSCORE_{BY} = \frac{1}{MAX_{BY}} \sum_{i=1}^n SCORE_{iBY}$$

Keterangan:

$DSCORE_{BY}$: Skor pengungkapan bank B pada tahun Y

MAX_{BY} : Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y

i : Item dalam framework

$SCORE_{iBY}$: Skor untuk item bank B pada tahun Y

Proses pemberian skor dalam penelitian melibatkan dua peneliti lain sehingga ketelitian data terjamin.

Variabel Kontrol

Leverage

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Haniffa & Cooke (2005), Hertanti (2005) dan Suhardjanto & Miranti (2009) yaitu menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

Profitabilitas

Indikator yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005) dan Nurkhin (2009) yang dihitung dengan membandingkan pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Pendapatan Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release 16*. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$FRD = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 RPTDK + \beta_3 KI + \beta_4 KKAI + \beta_5 RPTKAI + \beta_6 LEV + \beta_7 PROF + e$$

Keterangan:

FRD : pengungkapan risiko finansial

BSIZE : ukuran dewan komisaris

RPTDK : jumlah rapat dewan komisaris

KI : komposisi komisaris independen

KKAI : komposisi komite audit independen

RPTKAI : jumlah rapat komite audit

LEV : *leverage*

Prof : profitabilitas

β : koefisien regresi

e : *error*

HASIL

Deskriptif Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Populasi dan Sampel Perbankan

Tahun	Populasi	Sampel sesuai kriteria	Sampel digunakan
2007	29	25	20
2008	28	25	20
2009	29	25	20
Total	86	75	60

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2009 yang berjumlah 86 perusahaan. Berdasarkan teknik *purposive sampling* jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 75 perusahaan, namun hanya 60 *annual report* perusahaan yang menyediakan data dan informasi secara lengkap. Bank yang dihapus dari sampel yaitu Bank Agroniaga, Bank Artha Graha Internasional, Bank Eksekutif Internasional, Bank Nusantara Parahyangan dan Bank Windu Kentjana Internasional (Bank Multicor).

Tabel 3 menjelaskan statistik deskriptif dari variabel dependen penelitian. Informasi mengenai statistik deskriptif tersebut meliputi: nilai minimum, maksimum, rerata (*mean*) dan standar deviasi.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Tahun	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2007	0,188	0,781	0,459	0,162
2008	0,250	0,844	0,469	0,149
2009	0,188	0,844	0,466	0,183
Total	0,208	0,823	0,465	0,165

Rendahnya tingkat pengungkapan risiko finansial sebesar 46,50% mengindikasikan pengungkapan risiko finansial belum sepenuhnya dipatuhi oleh bank. Pihak manajemen bank sebagai penyedia informasi enggan untuk memperluas pengungkapan risiko serta pengaruhnya di masa depan dalam *annual report*-. Maraknya pemberitaan skandal laporan keuangan ganda Bank Century beberapa tahun lalu merupakan bukti lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan khususnya transparansi. Dewan direksi belum melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 32, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan komisaris yang merupakan inti dari tata kelola perusahaan seharusnya dapat menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2001). Dalam kasus Bank Century dewan komisaris belum berfungsi secara efektif, terbukti dengan pemecatan dan penjatuhan hukuman kepada komisaris utama Bank Century (<http://www.tempointeraktif.com>, 2009). Bank Indonesia selaku regulator belum membuat regulasi yang memadai dan spesifik mengenai apa saja yang harus diungkapkan dalam *annual report* juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pengungkapan termasuk pengungkapan risiko finansial pada perbankan di Indonesia.

Berdasarkan data selama tiga tahun tersebut, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan pengungkapan risiko finansial dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 1,00%. Tingkat pengungkapan risiko finansial tidak mengalami perubahan untuk tahun 2008 ke tahun 2009, tetap berada pada skor 46,60%. Bank dengan tingkat kepatuhan pengungkapan tertinggi untuk tahun 2007 yaitu Bank CIMB Niaga, untuk tahun 2008 Bank

Bukopin dan Bank Negara Indonesia untuk tahun 2009. Hal itu menunjukkan bahwa bank tersebut mengungkapkan risiko finansial lebih tinggi dibandingkan dengan bank sampel lainnya. Beberapa item risiko finansial telah diungkapkan secara spesifik, tetapi tingkat pengungkapan yang dilakukan belum sesuai dengan PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan risiko finansial oleh perusahaan perbankan Indonesia belum mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik dan memadai karena tidak diungkapkan secara keseluruhan (pada tingkat pengungkapan sebesar 100,00%) mengingat pengungkapan risiko finansial merupakan salah satu pengungkapan wajib yang harus dilakukan oleh bank.

Bank dengan tingkat kepatuhan terendah untuk tahun 2007 yaitu Bank Kesawan, tahun 2008 Bank OCB NISP dan Bank Himpunan Saudara untuk tahun 2009. Secara keseluruhan, rendahnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh ketiga bank tersebut dikarenakan pengungkapan terhadap risiko pasar dalam *annual report* tidak dilakukan secara spesifik untuk risiko suku bunga maupun risiko nilai tukar.

Statistik deskriptif dari variabel independen penelitian dijelaskan pada Tabel 4. Rerata jumlah anggota dewan komisaris adalah 5 orang; rerata frekuensi rapat dewan komisaris sebanyak 16 kali; rerata komposisi komisaris independen sebesar 59,42%; rerata komposisi komite audit independen sebesar 60,31%; rerata frekuensi rapat komite audit sebesar 13,55; rerata *leverage* sebesar 9,12%; dan rerata profitabilitas sebesar 11,07%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *backward*. Metode *backward* adalah salah satu metode pengolahan data dengan cara memasukan semua variabel indepen-

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Independen

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BSIZE	1,00	8,00	5,07	1,95
RPTDK (kali/tahun)	3,00	51,00	15,78	13,80
KKI (%)	42,86	100,00	59,42	10,95
KKAI (%)	33,33	100,00	60,31	10,89
RPTKA (kali/tahun)	1,00	50,00	13,55	10,90
LEV (%)	3,75	16,53	9,12	2,97
Profitabilitas (ROE)	-0,78	26,81	11,07	7,11

den secara keseluruhan dan secara otomatis SPSS akan menghilangkan satu persatu variabel independen yang dianggap kurang signifikan dalam memprediksi model persamaan regresi sampai didapatkan model persamaan regresi yang paling signifikan (Mauliano, 2009). Hasil regresi berganda setelah pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t	p-value
(Constant)	0,279	5,128	0,000
BSIZE	0,027	2,660	0,010
RPTDK	0,003	2,304	0,025
KKI	0,088	0,595	0,554
KKAI	-0,184	-1,213	0,230
RPTKA	0,104	0,591	0,557
Leverage	0,102	0,823	0,414
Profitabilitas	-0,006	-0,042	0,966
R Square	0,215		
Adjusted R ²	0,188		
Square			
F	7,829		
Sig	0,001		

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 18,80%. Berdasarkan nilai *adjusted R²* tersebut, dapat diartikan bahwa sebanyak 18,80% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dan sisanya sebanyak 81,20% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel tersebut menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,829 dengan probabilitas 1,00% (*p-value* < 5,00%). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 5,00% maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*) sehingga model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi pengungkapan risiko finansial atau dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit *leverage* dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial (Ghozali, 2006).

PEMBAHASAN

Tabel 5 menunjukkan ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial, sedangkan komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.

Ukuran dewan komisaris (*board size*) ($\beta = 0,027$ dan *p-value* = 0,010) memiliki *p-value* sebesar 1,00% pada tingkat signifikansi 5,00% menunjukkan bahwa *board size* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris sebuah bank, pengawasan akan lebih efektif dan optimal terhadap proses pengungkapan risiko finansial dengan lebih baik, lengkap, dan informatif.

Jumlah dewan komisaris yang besar akan memunculkan perpaduan *skill* antar anggotanya sehingga akan meningkatkan ketelitian pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris ber-

arti semakin banyak yang memikirkan risiko perusahaan, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mengatasi ancaman dari risiko tersebut. Coller & Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executif Officer* (CEO) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Jika dikaitkan dengan pengungkapan, maka dewan komisaris dengan ukuran yang besar akan memiliki *power* yang lebih besar untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi lebih banyak, termasuk pengungkapan risiko finansial (Coller & Gregory, 1999).

Koefisien positif yang dimiliki dewan komisaris menunjukkan pengaruh positif dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Abeysekera (2008) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Serta mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati & Riyanto (2005).

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Jumlah rapat dewan komisaris ($\beta = 0,003$ dan $p\text{-value} = 0,025$) memiliki $p\text{-value}$ sebesar 2,50% pada tingkat signifikansi 5,00% menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Hasil penelitian Vafeas (2003) dan Brick & Chidambaram (2007) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan termasuk pengungkapan. Semakin banyak rapat dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin banyak waktu untuk membahas masalah transparansi termasuk pengungkapan risiko finansial.

Menurut Muntoro (2006), proses rapat yang baik akan memberikan kesempatan kepada semua

pihak untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank sesuai pasal 9, PBI Nomor: 8/14/PBI/2006. Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, termasuk meningkatkan pengungkapan risiko finansial.

Koefisien jumlah rapat dewan komisaris positif memperlihatkan adanya pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge, *et al.* (2010), ketika semakin banyak rapat dewan komisaris yang diselenggarakan maka semakin mendorong kepatuhan terhadap pengungkapan risiko finansial.

Hipotesis ketiga adalah komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Komposisi komisaris independen (*independent director*) ($\beta = 0,088$ dan $p\text{-value} = 0,554$) memiliki $p\text{-value}$ sebesar 55,40% jauh di atas 5,00%. Nilai ini menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik karena komisaris tidak memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank. Peran dan tanggung jawab dewan komisaris independen pada perbankan di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalton, *et al.* (1999), Ho & Wong (2001), Suhardjanto & Afni (2009), dan Suhardjanto & Miranti (2009).

Komposisi komite audit independen ($\beta = -0,184$ dan $p\text{-value} = 0,230$) terhadap total komite audit menunjukkan $p\text{-value}$ sebesar 23,00%, lebih besar dari 5,00%. Berarti nilai komposisi komite

Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia

Djoko Suhardjanto & Aryane Dewi

audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membantu dewan komisaris untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank, komite audit independen belum melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Berapapun jumlah komite audit independen yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial yang dilakukan perusahaan. Dari nilai koefisien yang negatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi peran komite audit independen pada perbankan Indonesia masih kurang dan belum berfungsi secara optimal.

Variabel kelima, jumlah rapat komite audit merupakan variabel independen terakhir dalam penelitian ini. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit ($\beta = 0,104$ dan $p\text{-value} = 0,557$) bukan variabel yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan perbankan belum dilaksanakan dengan baik sesuai pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006. Jumlah rapat komite audit memiliki $p\text{-value}$ sebesar 55,70%, lebih besar dari 5,00%. Berapapun jumlah rapat yang dilaksanakan oleh komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial perusahaan. Koefisien jumlah rapat komite audit positif memperlihatkan adanya pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.

Leverage sebagai variabel kontrol memiliki $p\text{-value}$ 41,40% pada tingkat signifikansi 5,00% membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial perusahaan. Bank dengan tingkat ketergantungan utang tinggi tidak berpengaruh terhadap pengung-

kan risiko finansial meskipun pengungkapan dapat membantu *stakeholder* untuk memahami risiko finansial yang dialami oleh bank. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang mengemukakan tingkat *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Variabel kontrol lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Mekanisme tata kelola perusahaan dan profitabilitas yang mencukupi menjadikan perusahaan mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Profitabilitas ($\beta = -0,006$ dan $p\text{-value} = 0,966$) memiliki $p\text{-value}$ sebesar 96,60% pada tingkat signifikansi 5,00% menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang menyatakan besar kecilnya profitabilitas tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran tata kelola perusahaan dalam pengungkapan risiko finansial pada perbankan Indonesia. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan tata kelola perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko finansial. Variabel tata kelola perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko finansial berupa ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Variabel lainnya yaitu komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.

Tingkat pengungkapan risiko finansial sebesar 46,50%. Rendahnya tingkat pengungkapan risiko

finansial menunjukkan kurangnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan oleh perbankan Indonesia. Pihak manajemen bank sebagai penyedia informasi enggan untuk memperluas pengungkapan risiko dalam *annual report*. Penyebab lainnya dikarenakan Bank Indonesia selaku regulator belum membuat regulasi yang jelas, memadai dan spesifik mengenai item apa yang harus diungkapkan dalam *annual report* mengingat pengungkapan risiko finansial adalah salah satu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sesuai dengan PSAK No. 31 (revisi 2000), PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006) dan P3LKEPPBANK (2008).

Saran

Diharapkan adanya peningkatan peran dewan komisaris sehingga dapat meningkatkan pengungkapan risiko finansial pada perbankan Indonesia. Sebagai komponen penting yang mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan untuk dapat lebih diefektifkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bank Indonesia perlu membuat regulasi yang jelas mengenai item risiko wajib karena pengungkapan risiko finansial merupakan salah satu pengungkapan wajib yang harus dilakukan oleh bank.

Perlu diadakan sosialisasi mengenai penerapan PSAK No. 50 (revisi 2006) yang sudah diperbarui menjadi menjadi PSAK No. 60 (revisi 2010) agar di tahun 2012 dapat efektif diterapkan oleh bank. PSAK No.60 (revisi 2010) dapat dijadikan acuan utama dalam penerapan dan pengungkapan risiko finansial oleh perbankan berdampingan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik item pengungkapan risiko finansial yang lebih spesifik untuk masing-masing jenis risiko finansial. Bisa juga membandingkan tingkat pengungkapan risiko finansial antara industri di Indonesia dengan negara lain (studi komparatif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. 2008. The Role of Corporate Governace in Intellectual Capital Disclosure in Kenyan Listed firms. www.ssrn.com. (Diakses tanggal 30 Agustus 2010).
- Amran, A., Bin, A.M.R., & Hassan, B.C.H.M. 2009. Risk Reporting an Exploratory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Reports. *Managerial Auditing Journal*, 24 (1): 39-57.
- Andres, P., Azofra, V., & Lopez, F. 2005. Corporate Boards in OECD Countries: Size, Composition, Functioning and Effectiveness. *Journal of Corporate Governance*, 13 (2): 197-210.
- Brick, E.I. & Chidambaran, N.K. 2007. Board Meetings, Committee Structure and Firm Performance. <http://papers.ssrn.com>. (Diakses tanggal 11 November 2010).
- Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring The Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies. *European Accounting Review*, 16 (4): 791-826.
- Cety, T. & Suhardjanto, D. 2010. Pengaruh Corporate Governance terhadap Environmental Performance di Indonesia. *Makalah*. Dipresentasikan pada Call for Paper FE UNS tanggal 3 November 2010.
- Coller, P. & Gregory, A. 1999. Audit Committee Activity and Agency Cost. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18(4-5): 311-332.
- Dalton D., Daily C., Johnson J. & Ellstrad, A. 1999. Number of Director and Financial Performance: Meta Analisis. *Academy of Management Journal*, 42 (6): 674-686.
- Devilin, A.P. 2009. Analisis Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi.
- Ettredge, Johnstone, Stone, & Wang. 2010. The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies*, *Forthcoming*.
- Forum for Corporate Governace in Indonesia. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance*. *Seri Tata*

Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia

Djoko Suhardjanto & Aryane Dewi

Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Jilid II. Edisi ke-2. Jakarta. <http://fcgi.org.id>. 14 Agustus 2010.

- Ghozali, I. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics*. Forth Edition. New York: Mc. Graw-Hill.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*. 24: 391–430.
- Healy, P.M. & Palepu, K.G. 2001. Information Asymmetry, Corporate Disclosure and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31: 405-440.
- Helbok, G. & Wagner, C. 2006. *Determinants of Operational Risk Reporting in The Banking Industry*. Available on line at www.ssrn.com.
- Hertanti, D. 2005. Pengaruh Faktor-faktor Fundamental terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia. *Majalah Usahawan*, No. 10 Th XXIX, Oktober 2000.
- Ho, Simon, S.M., & Wong, K.S. 2001. A Study of Relationship between Corporate Governance Structure and Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 10: 139-156.
- Hossain, M. 2008. The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. *European Journal of Scientific Research*, 23, (4): 659-680.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Cetakan 2. Jakarta: Salemba Empat.
- International Financial Reporting Standart (IFRS) For Insurance Contracts. <http://www.WorldGAAPInfo.com>. (Diakses Tanggal 8 November 2010).
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2002
- Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*. <http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Des2002/SE02.pdf>. (Diakses Tanggal 9 November 2010).
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. <http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.I.5.pdf>. (Diakses Tanggal 9 November 2010).
- Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://governance-indonesia.com>. (Diakses Tanggal 9 November 2010).
- Kusumawati, D.N. & Riyanto, B. 2005. Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/21/DPN/2003 *Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2): 137-159.
- Linsley, P.M., Shrives, P.J. & Crumpton, M. 2006. Risk Disclosure: An Exploratory Study of UK and Canadian banks. *Journal of Banking Regulation*, 7 (3/4): 268-282.
- Mauliano, D.A. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia*. Artikel Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_10205276.pdf. (Diakses Tanggal 4 Februari 2011).
- Muntoro, R. K. 2006. *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Artikel Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. http://www.lmfeui.com/data/mui_Membangun%20Dewan%20Komisaris%20%20yang

- %20Efektif_Ronny%20K%20Muntoro.pdf. (Diakses Tanggal 10 Februari 2011).
- Nasution, M. & Setiawan, D. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nurkhin, A. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Oorschot, L. Van. 2009. Risk Reporting: An Analysis of German Banking Industry. <http://oathesis.eur.nl>. (Diakses Tanggal 30 Agustus 2010).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003. *Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006. *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*. Fourth Edition. John Wiley and Sons Inc.
- Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Solomon, J.F., A. Solomon, D.N., Simon & Nathan, L.J. 2000. A Conceptual Framework for Corporate Risk Disclosure Emerging from The Agenda from Corporate Governance Reform. *British Accounting Review*, 32: 447-478.
- Suhardjanto, D. & Afni, A.N. 2009. Praktik Corporate Disclosure di Indonesia, Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3: 243-364.
- Suhardjanto, D. & Permatasari, D. N. 2010. Pengaruh Corporate Governance, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure: Studi Empiris pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. *Kinerja, Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14 (2): 131-150.
- Surat Edaran Ketua Bapepam dengan Nomor: SE-02/BL/2008 *Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan*. 2008. www.bapepam.go.id/pasar.../publikasi_pm/.../P3LKEPPBANK.pdf. (Diakses Tanggal 8 November 2010).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006. *Studi penerapan prinsip-prinsip OECD 2004 dalam peraturan Bapepam mengenai tata kelola perusahaan*. Tahun http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-2006/Studi-Penerapan-OECD.pdf. (Diakses Tanggal 9 November 2010).
- Vafeas, N. 2003. Further Evidence on Compensation Committee Composition as A Determinant of CEO Compensation. *Financial Management*, 32: 53-77.